

**Peran Stakeholder Dalam Upaya Menurunkan Kasus Demam Berdarah Dengue Di
Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur**

Khansa Aristawidya, Dra.Nina Widowati, M.Si

**Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro**

Jalan Prof. Soedarto, S.G, Tembalang, Kota Semarang, Kota Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

2/2'25

ABSTRACT

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is one of the communicable diseases that remains a major health problem in Indonesia, including in East Jakarta. The high number of cases and deaths due to DHF in Pasar Rebo District indicates that the countermeasures implemented have been ongoing, but there are roles that have not been carried out optimally. This study aims to analyze the roles of Stakeholders in efforts to reduce DHF cases in Pasar Rebo District, as well as to identify the driving and inhibiting factors that affect the effectiveness of the control program. The Stakeholder role theory according to Nugroho (2014) is used as a framework to analyze the involvement of various parties in this program, which includes five main roles: policy creator, coordinator, facilitator, implementor, and accelerator. The research method used is descriptive qualitative, involving in-depth interviews and observations of Stakeholders involved in efforts to reduce DHF cases. The research results show that there are roles of Stakeholders in the efforts to reduce DHF cases in Pasar Rebo District, focusing on the alignment between the roles performed and their positions. Stakeholders involved in the DHF control program consist of various parties, each with supporting roles. In the efforts to reduce DHF cases, each Stakeholder, whether from the government, health sector, community, or private sector, has an important contribution to creating synergy, especially in Pasar Rebo. To enhance the role of Stakeholders in reducing DHF cases in Pasar Rebo District, it is necessary to raise public awareness through more intensive outreach regarding the importance of maintaining environmental cleanliness and their role in prevention. Additionally, revitalizing the role of PKK Jumantik cadres in Kelurahan Baru should be conducted by providing training and motivation so that they can proactively contribute to monitoring and prevention.

Keywords: Stakeholder Roles, Efforts to Reduce DHF Cases, Implementation Results in Pasar Rebo District

ABSTRAK

Demam Berdarah *Dengue* (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia, termasuk di Kota Jakarta Timur. Tingginya angka kasus dan kematian akibat DBD di Kecamatan Pasar Rebo menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan sudah berjalan, namun terdapat peran-peran yang belum menjalankan program dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Stakeholder* dalam upaya menurunkan kasus DBD di Kecamatan Pasar Rebo, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi efektivitas program penanggulangan. Teori peran *Stakeholder* menurut Nugroho (2014) digunakan sebagai kerangka dasar untuk menganalisis keterlibatan berbagai pihak dalam program ini, yang mencakup lima peran utama, yakni *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi terhadap *Stakeholder* yang terlibat dalam upaya penurunan angka DBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peran dari *Stakeholder* dalam upaya menurunkan angka DBD di Kecamatan Pasar Rebo, dengan fokus pada kesesuaian antara peran yang dilakukan dan kedudukannya. *Stakeholder* yang terlibat dalam program penanggulangan DBD terdiri dari berbagai pihak, masing-masing dengan peran yang saling mendukung. Dalam upaya penurunan angka DBD, setiap *Stakeholder*, baik yang berada di level pemerintahan, kesehatan, masyarakat, hingga sektor swasta, memiliki kontribusi penting untuk menciptakan sinergi terutama di Pasar Rebo. Untuk meningkatkan peran *Stakeholder* dalam menurunkan kasus DBD di Kecamatan Pasar Rebo, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan peran serta mereka dalam pencegahan. Selain itu, revitalisasi peran kader PKK Jumantik di Kelurahan Baru perlu dilakukan dengan memberikan pelatihan dan motivasi agar mereka dapat berkontribusi proaktif dalam pengawasan dan pencegahan.

Kata kunci: Peran *Stakeholder*, Upaya Menurunkan Kasus DBD, Hasil Pelaksanaan di Kecamatan Pasar Rebo

Pendahuluan

Penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD) merupakan salah satu jenis penyakit yang tidak asing di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus *Dengue* yang penularannya melalui gigitan Nyamuk *Aedes Aegypti* (Hargono dan Susilastuti, 2016). Karena itu, penyakit ini biasanya muncul ketika musim hujan karena tempat-tempat yang tergenang air menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

Penyakit DBD menyebabkan gejala yang bervariasi pada setiap individu yang terinfeksi atau bahkan berbeda menurut serotipe virus *Dengue* yang menjadi penyebabnya. Namun, gejala klinis yang umum pada pasien DBD meliputi demam, muntah dan mual, nyeri perut, mimisan atau epistaksis, serta feses yang berwarna gelap atau melena. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES) mencatat data utama mengenai demam berdarah *Dengue* (DBD) 4 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2022, termasuk jumlah penderita dan jumlah angka kematian adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah Penderita	Jumlah Kematian
2019	138.127	919
2020	103.509	725
2021	99.274	643
2022	143.000	924

Sumber: Kemenkes RI

Pada tahun 2023, Jakarta Timur dilanda wabah Demam Berdarah *Dengue* (DBD) yang mengalami peningkatan kasus tertinggi dibandingkan dengan daerah 2 lain di Jakarta. Penyebab utama dari peningkatan ini diduga karena musim hujan yang panjang, kondisi lingkungan yang tidak terkontrol, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah perkembangan nyamuk *Aedes Aegypti* sebagai vector penyakit DBD.

Jakarta Timur telah menjadi daerah dengan kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD) tertinggi di DKI Jakarta, mencatatkan jumlah kasus sebanyak 2.697 kasus. Hal ini merujuk pula pada data dari Dinas Kesehatan Jakarta Timur menunjukkan bahwa kecamatan Pasar Rebo menjadi kawasan dengan angka kasus DBD tertinggi, mencapai 425 kasus.

Kecamatan	Jumlah Kasus
1. Pasar Rebo	425
2. Kramat Jati	347
3. Cakung	327
4. Ciracas	326
5. Matraman	278
6. Duren Sawit	269
7. Cipayung	256
8. Jatinegara	184
9. Pulogadung	172
10. Makasar	113

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Perubahan iklim juga memiliki dampak yang signifikan terhadap penyebaran DBD. Modifikasi dalam

kelembaban udara, suhu, dan pola curah hujan dapat menciptakan kondisi lingkungan yang lebih cocok bagi nyamuk *Aedes Aegypti* untuk berkembang biak dan menularkan virus Dengue kepada manusia. Di samping vektor dan perubahan iklim, faktor-faktor seperti lingkungan, mobilitas penduduk, dan perilaku masyarakat juga memainkan peran penting dalam penyebaran DBD. Lingkungan yang tidak teratur dan tidak terawat, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, dapat menciptakan situasi yang lebih mendukung perkembangbiakan nyamuk *Aedes Aegypti*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aryanti et.al. (2024) pada tahun 2023 menunjukkan adanya indikasi yang kuat terhadap potensi penyebaran DBD di wilayah Jakarta Timur, khususnya pada Kecamatan Pasar Rebo dan Cakung. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Angka Bebas Jentik (ABJ) mencapai 82,75%, yang jauh di bawah standar minimal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu 95%. Angka ini mencerminkan tingginya kepadatan nyamuk, terutama di area pemukiman yang dapat meningkatkan risiko penularan DBD. Hal ini semakin memperburuk potensi penularan DBD di Kecamatan Pasar Rebo, terutama karena hampir 93,4% larva yang ditemukan adalah spesies *Aedes aegypti*,

nyamuk utama penyebar virus dengue, dengan sisanya adalah *Aedes albopictus* yang juga dapat berfungsi sebagai vektor penyakit.

Keberadaan jentik nyamuk *Aedes aegypti* yang dominan di wilayah Kecamatan Pasar Rebo memperburuk kondisi kesehatan masyarakat karena nyamuk ini menggigit di siang hari dan berkembang biak dengan cepat di area perkotaan yang memiliki sanitasi buruk. Dengan tingginya angka kepadatan larva dan dominasi *Aedes Aegypti*, wilayah ini sangat rentan terhadap penyebaran DBD. Data ini selaras dengan jumlah kasus DBD yang tinggi di Pasar Rebo pada tahun 2024, di mana kecamatan ini menduduki peringkat pertama dalam jumlah kasus DBD di Jakarta Timur (Hamzah, 2024).

Penanggulangan DBD dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pelaksanaan larvasidasi, penyuluhan, dan pengabutan insektisida sesuai dengan pedoman (Kemenkes, RI 2017). Upaya-upaya ini tidak dapat dilaksanakan tanpa keterlibatan peran *Stakeholder*, yaitu pemerintah, petugas kesehatan dan tokoh masyarakat yang dapat meliputi, *pertama* Motivasi kepada masyarakat untuk mengambil tindakan penanggulangan DBD. *Kedua*, Koordinasi yang dilakukan melalui pertemuan untuk merencanakan langkah-langkah

penanggulangan. *Ketiga*, Implementasi yaitu pelaksanaan program atau tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam penanggulangan DBD.

Terkait kondisi penanganan DBD di Kecamatan Pasar Rebo, terdapat sejumlah laporan dari masyarakat yang menyoroti frekuensi yang jarang nya pelaksanaan *fogging* serta penyuluhan jentik di wilayah mereka. *Fogging* merupakan salah satu metode pengendalian vektor yang penting dalam upaya memerangi penyebaran DBD oleh nyamuk *Aedes Aegypti*.

Sayangnya, penyuluhan mengenai langkah langkah seperti penerapan 3M Plus (menguras, menutup, mengubur, serta menambahkan upaya pencegahan lainnya), dirasakan kurang memadai oleh masyarakat. Keterbatasan informasi ini menyebabkan banyak warga tidak mengetahui cara efektif untuk mencegah keberadaan jentik di lingkungan sekitar. Adapun edukasi yang baik dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengendalian DBD dan mengurangi ketergantungan pada upaya pemerintah semata. Ketersediaan informasi yang terbatas mengenai langkah-langkah pencegahan DBD dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit ini. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi

antara pihak terkait dengan masyarakat guna meningkatkan efektivitas upaya pencegahan DBD di Kecamatan Pasar Rebo.

Dalam upaya menurunkan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, peran *Stakeholder* sangat penting. Menurut Lepa dkk (2019:3), peran merujuk pada tindakan yang dilakukan individu dengan tujuan memberikan kontribusi yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan posisi atau status sosial yang dimilikinya. Namun pada dasarnya peran merupakan bagian integral dari struktur sosial dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Brown dkk. (2001) analisis *Stakeholder* merupakan proses pengumpulan informasi dari individu atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. *Stakeholder* dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau institusi yang memiliki kepentingan terhadap proyek atau kebijakan yang sedang dijalankan (Sentanu & Yusrianti, 2024). *Stakeholder* utama adalah mereka yang memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan proyek, seperti pemerintah dan lembaga kesehatan. Sementara itu, *Stakeholder* sekunder adalah mereka yang memiliki peran lebih kecil namun tetap penting, seperti masyarakat lokal atau

sektor swasta yang mendukung kegiatan pencegahan.

Stakeholder yang terlibat dalam pengendalian DBD mencakup pemerintah, masyarakat, tenaga kesehatan, dan organisasi non-pemerintah. Menurut Nugroho (2014), *Stakeholder* memiliki lima peran utama yang dapat mendukung keberhasilan program, yaitu sebagai policy creator, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

Sebagai *policy creator*, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan program yang relevan untuk menanggulangi DBD di Kecamatan Pasar Rebo. Tanggung jawab tersebut dimulai dari perencanaan program hingga evaluasi pengendalian penurunan kasus DBD. Mereka memiliki peran kunci dalam mengambil keputusan menetapkan arah dan prioritas dalam penanganan kasus DBD, termasuk menetapkan program, pencegahan dan pengendaliannya.

Koordinator memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan, menyelaraskan, dan memastikan kolaborasi yang efektif antar *Stakeholder*. Koordinator bertugas untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi antara *Stakeholder* tersebut. Bentuk yang dapat diamati untuk penurunan angka kasus DBD yaitu pencegahan, pengobatan, perawatan,

edukasi dan kesadaran masyarakat dan monitoring evaluasi.

Sementara itu, fasilitator berperan untuk menyediakan dukungan, baik berupa sumber daya maupun infrastruktur, yang dibutuhkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam program pencegahan DBD.

Implementor adalah *Stakeholder* yang bertugas menjalankan atau melaksanakan program, termasuk dalam menerapkan program kepada kelompok sasaran yang dituju. Dalam hal ini *Stakeholder* yang terlibat perlu melakukan komunikasi efektif dan kerjasama dalam pelaksanaan program.

Akselerator, merupakan *Stakeholder* yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar pelaksanaan program dapat mencapai target dengan lebih cepat dan efisien.

Kurangnya koordinasi dan fasilitasi yang optimal di Kecamatan Pasar Rebo menjadi salah satu hambatan utama dalam menurunkan angka kasus DBD secara signifikan. Kurangnya evaluasi terhadap program yang telah dijalankan di Kecamatan Pasar Rebo juga menghambat akselerasi ini, sehingga diperlukan sistem evaluasi yang lebih baik untuk memastikan upaya yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata.

Pemerintah, khususnya dinas kesehatan, perlu lebih aktif melibatkan masyarakat dalam program-program pencegahan, seperti pelaksanaan *fogging*, kegiatan PSN, hingga kebersihan lingkungan. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi terkait program pencegahan DBD masih tergolong rendah, sehingga tidak ada pengawasan yang memadai terhadap implementasi kebijakan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Pasar Rebo perlu meningkatkan peran aktifnya, baik dalam aspek pengawasan maupun koordinasi lintas sektor. Sehingga perlu adanya peningkatan dalam strategi dan implementasi program yang lebih efektif, termasuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan sinergi antar *Stakeholder* terkait.

Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Pasar Rebo, Jakarta Timur, melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat dan Kecamatan Pasar Rebo. Meskipun begitu, terdapat indikasi bahwa masyarakat belum sepenuhnya memaksimalkan kontribusinya dalam upaya pencegahan DBD yang menghambat keberhasilan program. Banyak warga yang enggan melaporkan genangan air atau lokasi potensial untuk

perkembangan jentik nyamuk. Selain itu, minimnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh kader PKK Jumantik menunjukkan kurangnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya DBD. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakmaksimalan masyarakat dalam mendukung pencegahan DBD.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan analisis terkait peran *Stakeholder* dalam upaya menurunkan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tujuannya untuk mengevaluasi keterlibatan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga masyarakat, swasta, dan individu, dalam penanggulangan DBD serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi efektivitas program yang telah dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan yang dihadapi dalam mengurangi angka kasus DBD di wilayah tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti akan mengamati secara langsung dan tidak langsung proses kolaborasi para *Stakeholder* dalam upaya menurunkan kasus DBD di Kota Jakarta Timur. Subyek

pebelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, meliputi *Stakeholder* di Kecamatan Pasar Rebo, Puskesmas, Kader PKK Jumantik, dan masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap dokumen maupun laporan. Analisis dan interpretasi data menggunakan triangulasi data yang meliputi triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistis (BPS) Kota Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.083.883 jiwa pada tahun 2022. Kecamatan Pasar Rebo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Jakarta Timur. Dengan luas area sekitar 23,32 km², kecamatan ini memiliki posisi strategis dan aksesibilitas yang baik, menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan yang cukup pesat di Jakarta Timur.

Puskesmas Pasar Rebo menjadi fasilitas kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Pasar Rebo. Layanan yang diberikan oleh Puskesmas Pasar Rebo ditujukan kepada kesehatan perseorangan dan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan terdapat beberapa indikasi

masalah penanganan DBD yang kemudian akan dibuktikan dengan menganalisis dan mengidentifikasi peran dari masing-masing *Stakeholder*. Untuk mengetahui lebih mendalam, penulis mendapatkan informasi dari berbagai *Stakeholder* yang terlibat dalam upaya penurunan angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur.

Informan terdiri dari pihak Kecamatan Pasar Rebo, yang merupakan lokasi penelitian, serta masyarakat dari Kelurahan Kalisari, Kelurahan Kampung Baru, dan Kelurahan Gedong. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan perspektif yang beragam dan relevan dengan pelaksanaan program penurunan angka kasus DBD.

Peneliti akan menjelaskan bagaimana peran *Stakeholder* dalam upaya menurunkan angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dan kolaborasi *Stakeholder* yang terkait karena pada pelaksanaannya tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Untuk mengidentifikasi peran *Stakeholder* dalam upaya penurunan angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD), peneliti mengacu pada teori yang diusulkan oleh Nugroho

(2014). Dalam teorinya, Nugroho mengklasifikasikan peran *Stakeholder* ke dalam beberapa kategori, yaitu *Policy creator*, Koordinator, Fasilitator, Implementor, dan Akselerator. Setiap kategori ini mencerminkan tugas dan fungsi spesifik yang dimiliki oleh masing-masing *Stakeholder* yang akan menjadi fokus penelitian ini.

Policy creator memiliki peran penting yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan strategis serta menentukan arah program yang akan dijalankan (Nugroho, 2014). *Policy creator* di dalam konteks upaya penanggulangan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Pasar Rebo adalah pihak pemerintah kecamatan setempat, yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Tugas dari *policy creator* dalam penelitian ini adalah proses identifikasi untuk menentukan isu-isu yang perlu diprioritaskan dalam penanganan kasus DBD, menetapkan tujuan dan nilai yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan, identifikasi terhadap berbagai alternatif keputusan yang dapat diambil dengan diskusi bersama *Stakeholder* terkait, melakukan analisis mendalam mengenai konsekuensi dari berbagai alternatif yang telah diidentifikasi, membandingkan setiap alternatif beserta konsekuensinya, dan mengambil keputusan

mengenai alternatif yang paling efektif untuk menanggulangi kasus DBD.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan menyesuaikan dengan teori, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur merupakan *Stakeholder* yang memiliki kedudukan penting dalam pengupayaan penurunan angka kasus DBD. Oleh karena itu, seluruh program dan keputusan terkait penanganan dan pencegahan DBD harus melibatkan kecamatan sebagai pengendali utama di wilayah nya, agar program-program yang diimplementasikan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Proses rumusan program yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Pasar Rebo secara aktif melibatkan seluruh *Stakeholder*, termasuk Dinas Kesehatan Kota Jakarta. Kecamatan Pasar Rebo berupaya untuk mendapatkan saran dan masukan, yang akan memperkaya program yang dirumuskan. Meskipun demikian, kewenangan untuk mengambil keputusan akhir terkait program tetap berada di tangan Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur.

Koordinator merupakan salah satu *Stakeholder* yang memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan antar *Stakeholder* lainnya yang terlibat dalam kerjasama untuk mengatasi masalah DBD.

Dari *Stakeholder* yang terlibat dalam upaya penurunan angka kasus DBD, dapat diklasifikasikan bahwa Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, dan pihak tenaga kesehatan Puskesmas Pasar Rebo menjadi koordinator. Program pengupayaan penurunan DBD yang dijalankan berupa *fogging*, abatisasi, PSN dan kerja bakti. Kemudian pengorganisasian program edukasi kesehatan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, serta pemantauan kondisi kesehatan di wilayah tersebut. Sementara itu, tenaga kesehatan Puskesmas Pasar Rebo memberikan arahan kepada kelurahan untuk mengarahkan kader PKK Jumantik dalam melaksanakan pengecekan sumber-sumber penyakit nyamuk (PSN) dan kegiatan pencegahan lainnya.

Adanya koordinasi yang berlangsung antara pihak Kecamatan ke Kelurahan, dan tenaga kesehatan Puskesmas juga dilengkapi dengan sistem pelaporan yang terkoordinasi setiap minggu. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memastikan bahwa informasi terkini mengenai situasi DBD tersedia bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan masalah kesehatan ini. Proses pelaporan yang sistematis tidak hanya memfasilitasi pemantauan yang lebih baik terhadap perkembangan kasus, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang

lebih cepat dan tepat dalam merespons situasi kesehatan masyarakat. Dengan adanya data yang akurat dan terkini, pihak-pihak terkait dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan merumuskan langkah-langkah tindakan yang diperlukan.

Proses koordinasi ini mencakup komunikasi ke bawah, di mana hasil dari rapat koordinasi di tingkat kecamatan diolah menjadi informasi yang disampaikan ke kelurahan. Jika hasil pelaporan menunjukkan bahwa kasus DBD masih aktif, pihak kecamatan akan membagikan informasi tersebut kepada kelurahan, yang kemudian meneruskannya ke tingkat RT/RW. Dalam hal ini, diadakan sosialisasi kepada masyarakat, berupa himbuan dan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan langkah pencegahan. Seperti kader PKK yang bertugas sebagai Jumantik melaporkan terkait program PSN yang dilaksanakan, bahwa masih ada banyak rumah yang ditemukan jentik nyamuk, maka pihak kelurahan akan segera mengorganisir kegiatan pembersihan lingkungan dan pengecekan jentik secara lebih intensif.

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan dan kecamatan tidak hanya sebatas menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam rangka

sosialisasi program, tetapi juga mencakup upaya untuk mendorong peran aktif pihak RT dan RW. Edukasi ini meliputi berbagai aspek, mulai dari mengenalkan pola hidup bersih hingga tindakan pencegahan spesifik, seperti pemberantasan sarang nyamuk. Namun, berbeda dengan kelurahan Baru, di mana kegiatan PSN sudah tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak dilaksanakan secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi kegiatan PSN di kelurahan tersebut mengalami penurunan, yang berpotensi mengurangi efektivitas program pencegahan DBD.

Selain itu, dalam upaya penanggulangan DBD, Kecamatan Pasar Rebo juga melibatkan bantuan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pihak swasta. Kerjasama ini sangat penting, mengingat peran sektor swasta dalam mendukung inisiatif kesehatan masyarakat dapat memberikan dampak yang signifikan. Dengan adanya kolaborasi ini, pihak kecamatan meminta dukungan dari perusahaan untuk memberikan pembinaan guna meningkatkan efektivitas program-program pencegahan DBD.

Melalui sinergi ini, program-program pencegahan DBD dapat dijalankan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan dukungan dari pihak perusahaan, Kecamatan Pasar Rebo mampu mengakses sumber daya yang lebih bervariasi dan

inovatif, termasuk pemberian pelatihan kepada kader. Dengan demikian, upaya penanggulangan DBD tidak hanya mengandalkan sumber daya pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha.

Fasilitator merupakan *Stakeholder* yang memfasilitasi serta memenuhi kebutuhan, memiliki peran menerapkan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan aturan main diterapkan dengan benar dalam upaya menurunkan angka kasus DBD yang bertugas menjalankan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, serta menangani masalah. Pada pengupayaan penurunan angka kasus DBD, aturan main telah ditentukan oleh pihak Dinas Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan pedoman teknis terkait pencegahan dan penanganan penyakit menular, termasuk DBD.

Saat ini, Kementerian Kesehatan tengah mengupayakan program untuk mengawinkan nyamuk jantan *Wolbachia* kawin dengan nyamuk betina ber-*Wolbachia*, maka telur menetas ber-*Wolbachia*. *Wolbachia* dalam mengawinkan tubuh nyamuk *Aedes Aegypti* dapat menurunkan replikasi virus *dengue*. Hasil dari perkawinan ini adalah nyamuk yang tidak seagresif *Aedes aegypti*, yang

diharapkan dapat membantu mengurangi populasi nyamuk tersebut dan meminimalkan penyebaran virus penyakit.

Kecamatan Pasar Rebo juga aktif dalam memberikan sosialisasi serta demonstrasi praktis sebagai bagian dari upaya penanggulangan DBD. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada perangkat daerah, tetapi juga melibatkan masyarakat dari berbagai lingkungan, termasuk RT, RW, kader, dan warga setempat. Pihak tenaga kesehatan dari Puskesmas juga berperan penting dalam memfasilitasi kegiatan penanggulangan DBD dengan menyediakan alat fogging dan obat-obatan yang diperlukan untuk pengendalian nyamuk aedes aegypti. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap perkembangan kasus DBD di wilayah tersebut.

Untuk Ibu-ibu kader Jumantik mendapatkan berbagai fasilitas dari pihak kecamatan untuk mendukung peran mereka dalam pencegahan DBD. Seperti alat dan perlengkapan penting untuk identifikasi jentik, seperti senter untuk memeriksa tempat-tempat yang gelap dan sulit dijangkau. Selain itu, saat ada sosialisasi, kader biasanya menerima modul atau leaflet yang berisi informasi penting tentang pencegahan DBD dan cara menjaga kebersihan lingkungan.

Akan tetapi pihak kecamatan mengakui adanya beberapa hambatan dalam penanganan DBD, terutama ketika kasus DBD meledak di Kecamatan Pasar Rebo. Salah satu masalah utama adalah ketidakcukupan fasilitas alat *fogging* yang ada di Puskesmas, di mana beberapa alat tersebut dalam keadaan rusak. Pihak Puskesmas telah mengusulkan agar kecamatan dapat memiliki alat *fogging* baru, namun kecamatan tidak dapat sembarangan dalam pengadaan. Meskipun obat-obatan tersedia, alat yang diperlukan untuk pengendalian nyamuk tidak mencukupi.

Implementor adalah *Stakeholder* yang bertugas menjalankan atau melaksanakan program, termasuk dalam menerapkan program kepada kelompok sasaran yang dituju. Beberapa *Stakeholder* yang berperan sebagai implementor dalam penanggulangan DBD di Kecamatan Pasar Rebo meliputi Kecamatan Pasar Rebo, tenaga kesehatan dari Puskesmas, kader PKK Jumantik, serta masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, jika ditinjau dari beberapa indikator yang diperhatikan yaitu:

Pertama, komunikasi berfungsi untuk mengubah persepsi dan bahkan dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Menurut Edward III, yang dikutip dalam (Widodo 2019:97), terdapat tiga dimensi

penting dalam komunikasi program, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Ketiga dimensi sangat diperlukan agar proses komunikasi yang berlangsung dalam pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan sukses dan berdampak positif pada pelaksanaan program tersebut.

Komunikasi ini dilakukan oleh *Stakeholder* yang terlibat diantaranya:

1. Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta
Dalam melakukan komunikasi penyampaian informasi kepada masyarakat, Kecamatan Pasar Rebo memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk sosialisasi dan media sosial seperti Instagram yang dikelola oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi), untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Serta memanfaatkan grup WhatsApp antar kelurahan untuk memudahkan komunikasi antara berbagai *Stakeholder*.
2. Puskesmas Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur
Komunikasi yang terjalin melalui rapat rutin antara Puskesmas, Kader PKK jumentik, kecamatan, dan kelurahan. Diskusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan dapat berkolaborasi dengan lebih efektif dalam upaya penanggulangan

penyakit. Kemudian keberadaan grup WhatsApp antar warga sangat membantu dalam memperlancar aliran informasi dan komunikasi yang baik.

3. Kader PKK Jumentik

Melalui sosialisasi yang dilakukan, kader memberikan penjelasan tentang langkah-langkah 3M (menguras, menutup, dan mengubur) tempat-tempat yang dapat menjadi sarang nyamuk. Mereka juga menyampaikan informasi mengenai kegiatan pengendalian sarang nyamuk (PSN) yang rutin dilaksanakan. Dalam tahap komunikasi, kader tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memahami kebiasaan mereka di rumah.

Kedua, sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan sebuah program memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilannya. Keempat jenis sumber daya, yaitu sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan, saling berkaitan dan mendukung satu sama lain untuk memastikan program berjalan dengan efektif dan efisien. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada perencanaan dan kebijakan yang ada, tetapi juga pada bagaimana keempat sumber daya tersebut dikelola dan dimanfaatkan. Berikut sumber

daya yang berperan penting dalam pelaksanaan program:

1. Sumber daya di Kecamatan Pasar Rebo
Meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran yang sangat terbatas karena sebagian besar bersumber dari bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sumber daya perakatan seperti aula pertemuan, sumber daya kewenangan Kecamatan Pasar Rebo dan tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Puskesmas dan kelurahan dalam pengawasan, penanganan kasus DBD, termasuk pengiriman tenaga medis serta pengadaan obat-obatan
2. Puskesmas Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur
Puskesmas Pasar Rebo memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung program yaitu para dokter dan tenaga kesehatan. Untuk sumber daya anggaran, puskesmas tidak memiliki anggaran DBD sendiri sehingga Puskesmas harus cermat dalam mengelola dana yang ada agar bisa mencakup berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan. Kemudian peralatan yang dimiliki adalah alat *fogging* dan bubuk abatesasi. Untuk kewenangan, puskesmas dapat melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan pelaksanaan *fogging*.

3. Kader PKK Jumantik

Kader PKK Jumantik merasa sudah terpenuhi terkait sumber daya manusia, karena para kader atau tenaga kerja saling membantu dan bekerja sama, terutama dalam program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Para Kader PKK Jumantik tidak memiliki anggaran tersendiri untuk melakukan pengupayaan penurunan kasus DBD. Sumber daya peralatan yang mendukung seperti senter yang digunakan untuk memeriksa tempat-tempat yang mungkin menjadi sarang nyamuk. Kader PKK Jumantik memiliki kewenangan dari kelurahan dan kecamatan untuk melakukan program pemeriksaan jentik nyamuk setiap minggu, khususnya pada hari Selasa dan Rabu, dengan disertai bentuk laporan sebagai pertanggungjawaban.

Akselerator merupakan *Stakeholder* yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi agar pelaksanaan program dapat mencapai target dengan lebih cepat dan efisien. Dalam upaya penanggulangan DBD, Kecamatan Pasar Rebo menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) berkomitmen untuk menyediakan berbagai

program pelatihan keterampilan teknis yang mendukung inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka memastikan kualitas tenaga kerja kader Jumantik di wilayah Kecamatan Pasar Rebo tetap terjaga. Kader Jumantik yang terlatih dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah berkembangnya tempat perkembangbiakan nyamuk. Kemudian program ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan kebersihan, yang dapat mengurangi angka kejadian penyakit. Pelatihan ini juga memperkuat jaringan sosial di komunitas, menciptakan kolaborasi antara kader, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Kecamatan Pasar Rebo juga menjalin kerjasama dengan RSUD Pasar Rebo untuk ikut menyebarkan postingan di media sosial sebagai bagian dari upaya perlindungan ganda terhadap DBD. Kegiatan ini sejalan dengan penggunaan akselerator untuk mempercepat implementasi program-program pencegahan DBD. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam sosialisasi, akselerator ini berfungsi untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam upaya penanggulangan penyakit.

Secara garis besar, program-program yang dirancang oleh para *Stakeholder*. Program-program yang membantu pengupayaan penurunan kasus DBD untuk bisa meningkatkan responsivitas dan efektivitas dalam menangani masalah kesehatan masyarakat, khususnya terkait DBD. Melalui kerja sama yang erat, program ini menekankan pentingnya edukasi masyarakat mengenai pencegahan DBD, pemberantasan sarang nyamuk, serta peningkatan kebersihan lingkungan.

Upaya penurunan kasus DBD di Kecamatan Pasar Rebo, di Kota Jakarta Timur berarti melihat bagaimana peran *Stakeholder* bekerja sama untuk pengupayaan penurunan kasus DBD agar bisa mewujudkan masyarakat yang sehat, wilayah yang bebas dari ancaman penyakit menular dan jentik nyamuk, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan Notoatmodjo (2012) mendefinisikan perilaku sehat sebagai tindakan yang berkaitan dengan upaya pencegahan atau penghindaran terhadap penyakit serta faktor penyebab munculnya masalah kesehatan.

Dalam pengupayaan penurunan kasus DBD ini tentu tidak lepas dari para peran *Stakeholder* yang memiliki peran penting dan saling berkaitan. *Policy creator*, yang berperan dalam merancang dan menetapkan program yang strategis. Dalam

menjalankan fungsinya, seorang *Policy creator* harus mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara mendalam, sehingga setiap program yang dihasilkan dapat benar-benar mencerminkan aspirasi dan kondisi nyata yang ada di lapangan.

Stakeholder yang berperan sebagai implementor dan koordinator dalam program pencegahan penyakit memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang mereka lakukan bersifat terbuka dan transparan. Transparansi ini mencakup akses informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, yang membantu membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam program yang dijalankan. Peran *Stakeholder* yang terlibat dalam upaya penurunan kasus DBD di Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, terdapat beberapa kemajuan yang patut diperhatikan, seperti inovasi dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Adanya hambatan yang muncul terlebih lagi dengan melibatkan banyak *Stakeholder*. Seperti ketidakpedulian masyarakat terhadap informasi dan program yang disampaikan oleh *Stakeholder*. Selain itu kurangnya sumber daya manusia yang terlatih juga menjadi kendala, seperti partisipasi kader PKK Jumentik yang tidak merata. Hal ini dapat berdampak pada pelaksanaan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)

yang jarang dilaksanakan, sehingga mengurangi efektivitas upaya penanganan DBD di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa *Stakeholder* yang terlibat dalam Upaya Menurunkan Kasus DBD Di Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur menjalankan perannya masing-masing. Proses identifikasi *Stakeholder* dan perannya, diketahui bahwa *policy creator*, berperan dalam menentukan dan mengambil keputusan dalam sebuah program serta aturan dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Koordinator, Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan dan Puskesmas Pasar Rebo menjadi koordinator dalam pengupayaan penurunan kasus DBD. Fasilitator, Kecamatan Pasar Rebo dan Puskesmas menjadi pihak yang memfasilitasi berbagai upaya. Implementor, peran *Stakeholder* dalam bentuk implementor sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih belum optimal. Akselerator yang bekerja sama dengan perusahaan melalui program CSR dan pemanfaatan media sosial untuk memperluas informasi.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Pemerintah dapat menghadirkan program yang melibatkan pemuda.
2. Puskesmas dan Kader PKK Jumantik perlu mengadakan pelatihan mendalam yang fokus pada komunikasi efektif dan strategi pengelolaan persepsi negatif masyarakat.
3. Pihak Kelurahan baru dapat melakukan revitalisasi peran kader melalui pertemuan evaluasi untuk memberikan motivasi untuk dapat mengatasi ketidakaktifan kader PKK jumantik dalam penurunan kasus DBD.
4. Pihak Kecamatan Pasar Rebo dapat melakukan pengajuan rekomendasi kepada BPBD untuk mengembangkan rencana aksi terpadu yang mencakup pengawasan dan penanganan DBD.
5. Puskesmas dan kelurahan perlu turun langsung ke lapangan untuk mendampingi kader PKK Jumantik dalam mengecek rumah-rumah yang enggan didatangi untuk pengecekan jentik nyamuk.
6. Kader PKK Jumantik atau kelurahan dapat membuat pernyataan bersurat untuk disampaikan kepada masyarakat yang enggan membuka rumahnya untuk pengecekan jentik nyamuk.

Daftar Pustaka

Buku

- Lofland, J., & Lofland, L. H. (1984). *Analyzing social settings*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musri, Musri, and Rizki Afri Mulia. *Etika Administrasi Publik*. CV. Eureka Media Aksara, 2022.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Komputindo.(halaman 15-16) Policy*. Jakarta: PT. Elex Media
- Notoatmodjo, Soekidjo. "Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan." Jakarta: rineka cipta 193 (2012).
- Rahayu, S. (2019). *Peran perempuan dalam pembangunan di desa*. Makasar: CV Sah Media.
- Syafri, W. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Wisnubroto, P. (n.d.). *Konsep Dasar dan Manfaat Analisis Stakeholder*. (Tidak disebutkan sumber publikasi).

Jurnal

- Ali, Muhammad. Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. *Diss. Universitas Medan Area*, 2019.
- Anggraini, Dwi Ratna, Syamsul Huda, and Farid Agusbybana. "Analisis perilaku Stakeholder dalam pelaksanaan pengendalian demam berdarah dengue (DBD) di Kota Semarang". *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*. 14.1 (2023): 1-6.
- Ariyanto, A. (2021). Analisis Stakeholder sebagai Upaya Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Kota

- Surakarta. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(1), 11-24.
- Aryanti, A., Sutningsih, D., & Wahyuningsih, N. E. (2024). Survei Entomologi untuk Identifikasi Kepadatan Larva *Aedes Aegypti* pada Kelurahan Endemis di Jakarta Timur. *Indonesia Berdaya*, 5(1), 127-132
- Brown, D., Dillard, J., & Marshall, R. S. (2001). Stakeholder analysis for R&D project management. *Engineering Management Journal*, 13(1), 21-27.
- Dewi, Belinda Gracia, and Muhammad Farid Ma'ruf. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (Dbd) Di Kota Semarang." *Publika* 9.3 (2021): 283-294.
- Destiana, Riska, Kismartini Kismartini, and Tri Yuningsih. "Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 8.2 (2020): 132-153.
- Fatmasari, Eka Yunila, et al. "Penguatan Peran Kader Kesehatan dalam Kewaspadaan Terhadap Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kota Semarang." *Journal of Public Health and Community Service* 2.2 (2023): 68-72.
- Fedora, S. D., & Hudiyono, R. F. (2019). Analisis pemangku kepentingan (stakeholder) pada unit hubungan masyarakat (Humas) dan kesekretariatan PT Semen Padang. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 2(1), 6.
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707-6714
- Ibrahim, Alfrizal, Max R. Rembang, and Antonius Boham. "Peranan Petugas Humas Kantor Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sukawesi Utara Dalam Menyebarluaskan Pesan-Pesan Pembangunan Bagi Masyarakat." *Acta Diurna Komunikasi* 8.1 (2019).
- Lepa, L., Lokuge, P., & Sedera, D. (2019). The role of the IT artifact in IT project De-escalation: A sociomaterial perspective. *Information Systems Frontiers*, 21(4), 855-879.
- Lusiana, Novita, and Ika Putri Damayanti. "Peran Kader Jumantik (Juru Pemantau Jentik) Terhadap Pemberantasan Jentik Dalam Menurunkan Angka Kejadian Dbd Di Rt 05 Rw 03 Kel Air Hitam Wilayah Kerja Puskesmas Payung SEKAKI." *Ensiklopedia of Journal* 5.2 (2023): 254-259.
- Mahbub, Habybil. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Kota Sampang Jawa Timur." *Journal Of Administrative And Social Science* 4.2 (2023): 112-122.
- Mega, Titania Mega Titania, Sarah Sambiran, and Stefanus Sampe. "Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Minahasa." *Governance* 3.1 (2023).
- KOMAR, Samsul. Peran Stakeholder pada pelaksanaan kegiatan desa siaga dalam penanggulangan kejadian demam berdarah dengue (DBD) di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. *Diss. Universitas Gadjah Mada*, 2010.
- Nurfakhirah, Anggie Ayuni, R. Slamet Santoso, and Retna Hanani. "Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Bumdes Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Bumdes Mitra Sejahtera Desa Mendongan Kecamatan Sumowono)." *Journal of*

Public Policy and Management Review
10.2 (2021): 184-204.

Putra, Dimas Abdullah Marha. Peran Serta Tenaga Kesehatan Dan Tokoh Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejadian Demam Berdarah Dengue Di Kelurahan Tawanganom Kabupaten Magetan. *Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA*, 2020.

Rahmawati, Aisyah Annis. Analisis Peran Stakeholder Dalam Program Kota Layak Anak Di Kabupaten Boyolali. *Diss. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 2023.

Sentanu, I. G. P, & Yusrianti, S. H., (2024). Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Sucipto, Pramudiyo Teguh, Mursid Raharjo, and Nurjazuli Nurjazuli. "Faktor– faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan jenis serotipe virus Dengue Di Kabupaten Semarang." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 14.2 (2015): 51-56.

Website

Kemkes (2021) Data DBD Indonesia. Kemkes.go.id. diakses pada tanggal 28 mei 2024. Dilansir dari https://p2pm.kemkes.go.id/storage/publikasi/media/file_1619447946.pdf

Martins, J. (2024). Apa itu analisis pemangku kepentingan dan mengapa itu penting?. Asana.id. Diakses pada tanggal 2 Juni 2024. Dilansir dari <https://asana.com/id/resources/project-Stakeholder>

Mujiono. (2022). Angka Kesakitan DBD di Pasar Rebo Tertinggi se-Jakarta Timur. Medcom.id. Diakses pada tanggal 19 Mei 2024. Dilansir dari <https://www.medcom.id/nasional/metro/nbwDQ4Dk-angka-kesakitan-dbd->

[di-pasar-rebo-tertinggi-se-jakarta-timur](https://www.medcom.id/nasional/metro/nbwDQ4Dk-angka-kesakitan-dbd-di-pasar-rebo-tertinggi-se-jakarta-timur)

Mujiono. (2022). Angka kesakitan DBD di Pasar Rebo tertinggi di Jakarta Timur. Antaranews.com. Diakses pada tanggal 23 Mei 2024. Dilansir dari <https://www.antaranews.com/berita/3094105/angka-kesakitan-dbd-di-pasar-rebo-tertinggi-di-jakarta-timur>

Mujiono. (2024). Didominasi Anak-Anak, Kasus DBD Cukup Tinggi di Pasar Rebo, Warga Diimbau untuk Lakukan Ini. Ipol.id. Diakses pada tanggal 22 Mei 2024. Dilansir dari <https://ipol.id/2024/05/didominasi-anak-anak-kasus-dbd-cukup-tinggi-di-pasar-rebo-warga-diimbau-untuk-lakukan-ini/>

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, "Profil Kota Jakarta Timur 2021", <https://jakarta.bps.go.id>, <https://pasarrebo.id/>